

**PERAN JAPAN INTERNATIONAL COORPORATION AGENCY (JICA)  
DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA MELALUI  
CLIMATE CHANGE PROGRAM LOAN (CCPL) 2007-2010**

*Gildhalisa*

*(g.lisa2204@gmail.com – +6281959221805)*

*Anggota: Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si*

***Abstract***

*This research analyzes JICA's (Japan International Corporation Agency) Role addressing climate change in Indonesia with Climate Change Program Loan (CCPL). "Climate Change Program Loan" (CCPL) is a three year program (from 2007-2009) as agreed by the Indonesian government and the Japanese government, which aims to help Indonesia policy reform in mitigation and adaptation adresing climate change.*

*This study uses descriptive qualitative method, liberal perspective., International cooperation theory, and foreign aid concept. According to the liberalist perspective of climate change occurs as a result of increased CO2 emissions caused by humans and their activities, which must be faced with decresing global warming by reducing CO2 emissions at the national and international level.*

*This research shows that, in addressing climate change established a policy that is designed to support policy actions agreed by key policy pillars of mitigation, adaptation, and cross-cutting issues in terms of greenhouse gas reductions to strengthen the country's resilience to the negative impacts anticipated due to climate change and improving institutional framework related to mitigation and adaptation.*

*Keywords: JICA (Japan International Corporation Agency), JICA (Japan International Corporation Agency) CCPL, Climate Change, Indonesia*

**Pendahuluan**

Penelitian ini akan mengangkat mengenai Peran JICA (*Japan International Corporation Agency*) dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia melalui program *Climate Change Program Loan* (CCPL). Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak dari fenomena perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan di Indonesia dalam satu abad terakhir. Kajian yang dilakukan oleh Boer dan Faqih<sup>1</sup> memperkirakan kenaikan temperatur dari 0,2°C menjadi 0,3°C per dekade disluruh kawasan indonesia. Dan juga diperkirakan akan terjadi kenaikan temperature

---

<sup>1</sup> Boer, R. Wahab, I. and Hariadi, M.H. 2004. *Understanding Farmers' Need To Climate Information*. In R. Boer, I. Wahab., M.H. Hariadi and H. Hardjanto. Reducing Climate Risk for Potato andChili Production at Pengalengan, Bandung District, West Java.

permukaan laut sebagai akibat meningkatnya temperature permukaan. Selain itu, perubahan iklim dapat terdeteksi dari perubahan curah hujan yang terkait dengan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrim selama periode 1981 sampai dengan 2007.<sup>2</sup> Pengaruh manusia terhadap perubahan iklim global juga telah dilaporkan berbagai penelitian sejak pertengahan abad ke-20. Pengaruh tersebut semakin kuat berdasarkan berbagai penelitian dari sampel di seluruh dunia. Indonesia memproduksi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berkontribusi sebesar 5 persen dari total emisi GRK dunia.

fenomena perubahan iklim yang sedang terjadi menambah kompleksitas tantangan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi Indonesia. Situasi ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Kerangka Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan sepuluh tahun kemudian (2004) Protokol Tokyo. Pada bulan Desember 2007, Indonesia menjadi tuan rumah *Conference of the Parties, Thirteenth session* (COP) ke-13 di Bali, tentang Konvensi Perubahan Iklim. Sebagai negara non-Annex I yang tidak berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia berbagi visi "mengemban tanggung jawab yang sama tetapi dengan kewajiban yang berbeda" dalam memerangi perubahan iklim, yang merupakan konsep dasar UNFCCC. Dan juga termasuk mengenai mekanisme pendanaan perubahan iklim. Mekanisme pendanaan yang selama ini diinisiasi adalah lewat kerja sama yang bersifat bilateral dan multilateral, dan dalam bentuk hibah, hutang, teknikal asisten maupun peningkatan kapasitas.<sup>3</sup>

Untuk mendukung Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pada inisiatif inisiatif "*Cool Earth Partnership* " yang diluncurkan oleh Pemerintah Jepang (GOJ)," *Climate Change Program Loan*"(CCPL) dirancang, dan policy matrix yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia, AFD dan pemerintah Jepang, dalam semester pertama tahun 2008.

## **Pembahasan**

### **Arti Penting Indonesia bagi Jepang**

Secara historis, diantara negara-negara Asia lainnya Indonesia terbukti menjadi negara yang sangat menarik bagi Jepang melalui sumber daya alamnya yang sangat kaya dengan lokasi geopolitik yang sangat strategis, sehingga kedatangan Jepang pada akhir tahun 1930 didorong oleh minyak Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Jepang di Asia Tenggara berkembang pertama dari perusahaan kepentingan sumber daya alam Indonesia, potensi pasar ekspor, dan lokasi geopolitik.

Hubungan antara Jepang dan Indonesia semakin memantapkan sifatnya sebagai mitra strategis di berbagai lapisan bidang. Indonesia merupakan negara terpenting bagi Jepang terutama bila dilihat dari pasokan sumber daya alam yang sangat substansial

---

<sup>2</sup> Indonesia's National Climate Change Council (DNPI). (2010.) *Indonesia's greenhouse gas abatement cost curve*". August 2010

<sup>3</sup> *Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk Keadilan Iklim, 2012 (Disampaikan pada diskusi public Pendanaan Perubahan Iklim dan Penyelamatan Hutan pada Kamis, 4 Oktober 2012 di Jakarta).*

bagi Jepang. Selain itu ikatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan juga turut menambah pentingnya Indonesia bagi Jepang.<sup>4</sup> Indonesia, merupakan salah satu sumber pemasok bahan baku untuk Jepang pasca perang dingin tahun 1960 di bawah Kepemimpinan Hayato. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Ohira Masayoshi, dalam pesan suratnya ketika bertemu Presiden Soekarno pada tahun 1962, mengatakan bahwa bahwa "Indonesia merupakan negara yang sangat penting untuk bermitra dengan Jepang dalam kerjasama ekonomi di Asia dan Jepang harus membantu sebanyak mungkin dalam bekerja sama dengan bangsa."<sup>5</sup>

Selain bahan baku dasar, Indonesia juga menjadi tempat strategis jalur perdagangan yang sangat penting bagi Jepang. Yang mana Impor minyak mentah dari Tengah Timur dan bahan baku dari Australia seperti bijih besi dan batu bara melewati jalur-jalur laut utama yang ditemukan di sekitar Indonesia terutama Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda dan Selat dari Sulawesi.

Menurut Ohno, ada dua faktor historis yang membuat visi bantuan dan pembangunan Jepang berbeda dengan negara donor lainnya, yaitu, pertama, Jepang merupakan satu-satunya negara donor yang non barat dengan sejarah kesuksesan industrialisasi. Jepang berhasil mengatasi kehancuran setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dengan menguatkan manufacturing base yang berkontribusi dalam perdagangan dan investasi yang kemudian mampu mendorong pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, keputusan Jepang setelah perang untuk menolak penggunaan kekuatan militer menekan ODA berperan sebagai alat diplomasi.<sup>6</sup>

### ***Official Development Assistance (ODA) Jepang***

Jepang juga mempunyai keunikan dalam pembagian distribusi ODA yang besar, yaitu berupa pinjaman. Hal ini didasari argumen bahwa loan aid dapat memobilisasi sumber daya yang lebih besar seperti membiayai proyek infrastruktur yang berskala besar. Di saat bersamaan, dituntut juga kedisiplinan negara penerima dalam mengatur kemampuan hutang (*debt management capacity*) dan tanggung jawab donor untuk menjamin keberlanjutan proyek yang dijalankan. Lingkup waktu dari hubungan donor-resipien relatif lebih lama di bawah skema *loan aid*, yang menuntut pembagian tanggung jawab negara donor-resipien.<sup>7</sup>

ODA dapat dibagi menjadi dua jenis: bilateral dan multilateral. Dalam bentuk bilateral, bantuan dapat selanjutnya dibagi menjadi bantuan hibah, kerjasama teknis dan pinjaman ODA.

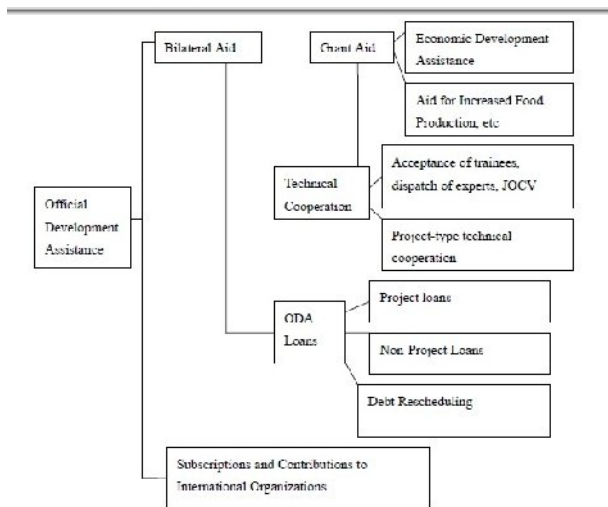
---

<sup>4</sup> Jepang Anggap Stabilitas Ekonomi Indonesia Penting Bagi Asia. Dikutip: <http://www.setkab.go.id/berita-6385-jepang-anggap-stabilitas-ekonomi-indonesia-penting-bagi-asia.html>

<sup>5</sup> Ohira Notes on Sukarno Meeting. November 5 1962, File No. 0120-2001-01553 A 423, MOFA Diplomatic Records Office, Tokyo.

<sup>6</sup> <http://www.kotopan.jp/Eng.html>

<sup>7</sup> Ohno, Izumi. 2003. Japan's ODA at a Crossroads: Striving for A New Vision. Japan Economic Current, No. 31, April, 4-7. Ohno, Izumi. 2003. Japan's ODA at a Crossroads: Striving for A New Vision. Japan Economic Current, No. 31, April, 4-7.



Sumber: Ministry of Foreign Affairs, Japan's ODA Annual Report 1999, Tokyo

Jepang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang pada tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lama. Pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur ekonomi sosial, seperti energi, transportasi dan utilitas umum. Tujuan utama ODA di Jepang adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan perkembangan masyarakat internasional dan dengan demikian secara tidak langsung membantu Jepang dalam memastikan keamanan dan kemakmuran negaranya.<sup>8</sup>

### Oda Jepang di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar (bahkan pernah menjadi negara yang terbesar untuk kurun waktu tertentu) penerima ODA Jepang. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia itu sendiri yang sangat vital baik bagi kepentingan geoekonomi maupun kepentingan geopolitik Jepang. Terdapat sejumlah pendapat yang menjelaskan mengapa Indonesia dianggap 'penting' oleh Jepang, sehinggamenjadikan Indonesia sebagai fokus bagi penyaluran ODA Jepang, yakni:<sup>9</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara penerima investasi (FDI) Jepang terbesar. Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impornya. Dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an, Indonesia memiliki ketergantungan-impor dari Jepang, dan ketergantungan-ekspor kepada Amerika Serikat. Namun semenjak itu, baik impor dan ekspor Indonesia terganggu pada Jepang.<sup>10</sup> Indonesia merupakan penyedia (supplier) LNG (liquefied natural gas) terbesar bagi Jepang. Selain itu pula, Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak Jepang (dengan jumlah yang cukup signifikan). Kekayaan yang

<sup>8</sup> Ministry of Foreign Affairs, Japan. 2003. Revision of Japan's Official Development Charter. Tokyo.

<sup>9</sup> Bruce M. Koppel and Robert M. Orr, Jr., eds., Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New Era. Boulder, CO: Westview Press, 1993.hlm. 43.

<sup>10</sup> William R. Nester, Op. Cit., hlm. 135.

melimpah akan sumber daya alamnya, upah tenaga buruhnya yang relatif murah (walaupun sekarang ini disaingi oleh Vietnam), serta ditambah dengan jumlah penduduknya yang padat sebagai sebuah potensi pasar, membuat Indonesia ‘menarik’ di mata Jepang.

Kepentingan geopolitik Jepang atas wilayah Indonesia, (khususnya pasca krisis minyak), yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Lombok, baik sebagai jalur perdagangan internasional Jepang maupun jalur pengiriman minyak Jepang dari Timur-Tengah.<sup>11</sup> Posisi Indonesia yang dipandang Jepang sebagai ujung tombak ASEAN, yang memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kekayaan alamnya maupun potensi pasarnya, sehingga Indonesia dianggap memiliki peranan yang penting di kawasan ASEAN.

ODA Jepang untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia melalui program pembayaran reparasi perang pada tahun 1958 (dan berakhir pada tahun 1970), sebesar 223 juta Dollar AS.<sup>12</sup> Pada tahun tersebut tipe bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis dan hibah. Sedangkan untuk bantuan tipe pinjaman (Yen), baru mulai disalurkan pada tahun 1966, sebesar 10,8 milyar Yen. Bantuan selanjutnya terjadi pada tahun 1967, saat terjadinya masa peralihan dari rezim Soekarno (Orde Lama) ke rezim Soeharto (Orde Baru).

Pada April tahun 1991, adanya standar baru dalam pengimplementasian ODA, yakni penegakan HAM dan penyebaran nilai demokrasi. Inisiatif ini mulai terlihat manakala Jepang membuat Piagam ODA 1992, yang mengandung lima unsur pokok dalam setiap penyaluran ODA-nya, yakni:<sup>13</sup>

1. kemanusiaan (*humanitarianism*),
2. hubungan yang setara dan saling ketergantungan (*interdependence*),
3. perlindungan lingkungan (*environmental protection*),  
Perdamaian (*peace*)

### **Kebijakan ODA Jepang Dibidang Lingkungan hidup**

Jepang mulai mencanangkan program bantuan di bidang lingkungan hidup semenjak mengikuti konferensi G7 di Bonn, Jerman pada tahun 1985. Ketika isu lingkungan global muncul sebagai area fokus baru dunia, Jepang merupakan donor ODA terbesar di dunia (itu peringkat pertama dari tahun 1990-2000).<sup>14</sup> Salah satu cara

---

<sup>11</sup> Dennis D. Trinidad, “Japan’s ODA at The Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s Development Assistance To Southeast Asia”, dalam Jurnal Asia Perspective, Vol. 31, No. 2, 2007, hlm. 115, yang diakses dari [www.asianperspective.org/articles/v31n2-e.pdf](http://www.asianperspective.org/articles/v31n2-e.pdf), pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 14.20 WIB.

<sup>12</sup> Arase, David. 1995. *Buying power : the political economy of Japan's foreign aid*. Lynne Rienner Publishers.

Op. Cit., hlm 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>14</sup> MOFA, *Japan’s Official Development Assistance, Accomplishment and Progress of 50 Years*, Tokyo, 2005, <<http://www.mofa.go.jp/POLICY/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/>>, diakses pada 10 februari 2013 pukul: 13.20

utama Jepang memilih untuk menyajikan kepemimpinan mereka pada masalah ini karena itu menjamin sejumlah catatan ODA untuk mendukung berkelanjutan pembangunan negara-negara berkembang. keberhasilan Jepang dalam mengatasi masalah pencemaran domestik serta kemakmuran ekonomi menempatkan Jepang dalam-unik posisi untuk memainkan peran utama dalam kerjasama lingkungan internasional.

### ***Japan International Cooperation Agency (JICA).***

Pemerintah Jepang mendirikan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* pada 1 Agustus 1974 dan merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. JICA dengan format yang baru bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik, serta pinjaman ODA. Meskipun dalam bagan digambarkan bahwa bantuan hibah disalurkan melalui JICA, akan tetapi beberapa jenis bantuan hibah akan tetap diberikan langsung oleh DEPLU Jepang (melalui kantor Kedutaan Besar) dalam rangka kebijakan diplomatik. JICA telah melakukan kerjasama bilateral dengan 150 negara hal tersebut menjadikan JICA sebagai salah satu lembaga pemberi bantuan bilateral terbesar di dunia. Kegiatan-kegiatan JICA bagi negara-negara berkembang diantaranya sebagai berikut :

1. Kerjasama Teknik
2. Program Pelatihan teknik

JICA di Indonesia merupakan salah satu yang tertua dan terbesar di antara sekitar 150 kantor perwakilan JICA yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif sampai TA Jepang 2007 dimana telah terkirim 35.630 peserta Indonesia untuk mengikuti program pelatihan di Jepang dan 11.108 tenaga ahli Jepang telah ditugaskan di Indonesia. Dalam merealisasikan bantuannya untuk Indonesia, JICA merumuskan program bantuan yang kemudian disebut *Country Assistance Strategy* atau Strategi Bantuan Pemerintah Jepang. *Country Assistance Strategy* yang dibuat dititik beratkan pada empat bidang prioritas kerjasama.<sup>15</sup>

1. Kesenambungan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor swasta
2. Menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
3. Perdamaian dan stabilitas
4. Lingkungan

*Country Assistance Strategy* yang dibuat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar Strategi Bantuan yang dibuat dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia sesuai dengan fungsinya bahwa JICA memberikan bantuan bagi pembangunan Negara berkembang.

---

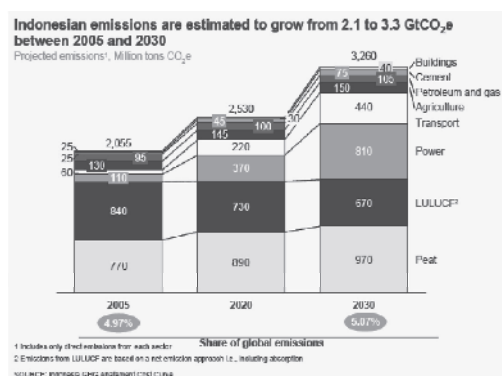
<sup>15</sup>Bulletin JICA di Indonesia, hal. 11

## Program *Climate Change Program Loan* (CCPL)

### 1. Latar Belakang terbentuknya CCPL

Data kejadian bencana yang dicatat dalam the OFDA (*Office of US Foreign Disaster Assistance*)/ CRED (*Center for Research on Environmental Decisions*) *International Disaster Database* mengungkapkan sepuluh kejadian bencana terbesar di Indonesia yang terjadi dalam periode waktu antara tahun 1907 dan 2007, terjadi setelah tahun 1990-an dan sebagian besar merupakan bencana yang terkait dengan iklim, khususnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan epidemi penyakit.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejadian bencana terkait iklim mengalami peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun intensitasnya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh 10 bencana terbesar tersebut mencapai hampir 26miliar dolar dan sekitar 70% merupakan kerugian akibat bencana yang terkait dengan iklim.

Pengaruh manusia terhadap perubahan iklim global juga telah dilaporkan berbagai penelitian sejak pertengahan abad ke-20. Pengaruh tersebut semakin kuat berdasarkan berbagai penelitian dari sampel di seluruh dunia. Indonesia memproduksi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berkontribusi sebesar 5 persen dari total emisi GRK dunia. Kontribusi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, sebesar 0,6 persen pada tahun 2005.<sup>17</sup> Indikator ini menunjukkan bahwa laju kenaikan emisi GRK jauh diatas kenaikan PDB, serta memberikan indikasi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak berkelanjutan. Kontribusi utama peningkatan emisi gas rumah kaca berasal perubahan lahan dan perubahan tata guna lahan (kebakaran hutan, penebangan liar, degradasi lahan gambut, penggundulan hutan, dan lain sebagainya). Walaupun demikian, emisi GRK dari sektor energi juga mengalami peningkatan dramatis dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Emisi GRK dari sektor-sektor lainnya juga mengalami kenaikan, walaupun tidak sebesar kenaikan dari kedua sektor utama tersebut.



<sup>16</sup> Tumiwa Fabby, 2010 hal 20

<sup>17</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia, 2009. 'Emisi Gas Rumah kaca Dalam Angka'.

Diakses di [www.new.menlh.go.id](http://www.new.menlh.go.id)%2FPublikasi%2FBuku%2FLain-lain%2FEmisi\_GRK.pdf pada 21 februari 2013

Dalam rangka melaksanakan penurunan emisi GRK sebagaimana yang telah ditargetkan, Indonesia berusaha menunjukkan keseriusannya menanggulangi dampak perubahan iklim global melalui berbagai kebijakan. menjelang Konferensi para Pihak ke-13 (COP-13) dari Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali pada Desember tahun 2007. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengeluarkan naskah Rencana Aksi Nasional menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), yang mencakup situasi fenomena perubahan iklim di Indonesia dan usulan rencana aksi Sejalan dengan mitigasi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim, melalui koordinasi antarsektor pembangunan.

Lebih kurang enam bulan setelah COP 13, dengan mempertimbangkan perlunya meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum perundingan internasional dalam pengendalian perubahan iklim, Presiden RI membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden No. 46/2008<sup>18</sup>. Presiden RI menjadi Ketua DNPI, yang dibantu oleh dua orang Wakil Ketua, yakni Menko Perekonomian dan Menko Kesra, 17 Menteri terkait dan Kepala BMKG sebagai anggota. Untuk melaksanakan mandatnya, maka Presiden menunjuk seorang Ketua Harian, Kepala Sekretariat, dan dibantu oleh Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana kegiatan Dewan sehari-hari.

Upaya untuk mengoperasionalkan rekomendasi dalam RAN-PI kedalam RPJMN 2004-2009 coba dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui penyusunan naskah *National Development Planning: Indonesia Response to Climate Change*. Naskah yang kemudian dikenal sebagai “*Yellow Book*” ini mulai diperkenalkan secara terbatas saat berlangsungnya COP 13, tetapi baru dipublikasikan secara penuh pada tahun 2008.<sup>19</sup> *Yellow Book* juga ditujukan sebagai dokumen perantara (*bridging document*) yang mempertimbangkan berbagai isu sektoral dan lintas sektoral yang sensitif terhadap perubahan iklim, sekaligus untuk mempertajam program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN 2004-2009.

Naskah “*Yellow Book*” Bappenas berusaha mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu ditetapkan juga prioritas sektor untuk adaptasi yaitu:

- (i) pertanian
- (ii) daerah pesisir, pulau-pulau kecil, kelautan dan perikanan; dan mitigasi yaitu: energi, pertambangan, dan kehutanan.

Selanjutnya, dalam "*Country Assistance Program for Indonesia* " Jepang, dirumuskan pada bulan November 2004,<sup>20</sup> bantuan untuk pelestarian lingkungan telah

---

<sup>18</sup> Peraturan presiden [www.esdm.go.id/batubara/doc\\_download/845-peraturan-presiden-ri-no46-tahun-2008-.html](http://www.esdm.go.id/batubara/doc_download/845-peraturan-presiden-ri-no46-tahun-2008-.html) diakses pada: 25 januari 2013

<sup>19</sup> *Study on Local Action In Asia Contributing to Climate Change and Mitigation and Alternative Financial Mechanism in Indonesia* diakses di: [dp2m.umm.ac.id/files/file/financinglocalowcarbondevelopment\\_indonesia.pdf](http://dp2m.umm.ac.id/files/file/financinglocalowcarbondevelopment_indonesia.pdf) pada 2 maret 2013

<sup>20</sup> Government of Japan.2004. *Country Assistance Program for Indonesia*. Diakses di: [www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e\\_asia/indonesia.pdf](http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/indonesia.pdf) pada: 21 desember 2013



terdaftar sebagai salah satu bidang prioritas, dan JICA menetapkan bantuan untuk penanggulangan terhadap perubahan iklim sebagai salah satu agenda untuk memperkuat dukungannya. Kemudian pada Konferensi Davos pada Januari 2008, Perdana Menteri Fukuda mengumumkan "*Cool Earth Partnership*" sebagai Mekanisme keuangan baru, yang mana kemitraan ini bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang selama lima tahun yang melakukan upaya untuk mengurangi Emisi gas rumah kaca dan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara yang kompatibel, atas dasar kebijakan konsultasi antara Jepang dan negara-negara.

Dalam G8 Summit Sesi Outreach pada tanggal 9 Juli 2008, Perdana Menteri Fukuda menunjukkan apresiasi atas kontribusi Indonesia dalam kesuksesan COP13.<sup>21</sup> Perdana menteri Fukuda juga berjanji bahwa akan memberikan pinjaman program perubahan iklim sebesar 300 juta dolar yang mana diputuskan sebagai kasus pertama untuk Pinjaman ODA dalam isu Perubahan Iklim Jepang yang didasarkan pada "*Cool Earth Partnership*".

The CCPL ke Indonesia terdiri dari tiga pinjaman tunggal yang direncanakan antara tahun 2007 dan 2009, memasok bantuan kepada pelaksanaan matriks kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Jepang dan awalnya Pemerintah Indonesia. Matriks ini didasarkan pada "Rencana Aksi Nasional Mengatasi Perubahan Iklim" di Indonesia yang diluncurkan di Bali COP 13. CCPL ini dirancang untuk mendukung aksi-aksi kebijakan yang disepakati berdasarkan kunci pilar kebijakan mitigasi, adaptasi, dan isu-isu lintas sektoral dalam hal pengurangan gas rumah kaca mendorong dan penyerapan, memperkuat ketahanan negara terhadap dampak negatif diantisipasi karena perubahan iklim dan meningkatkan kerangka kerja institusional yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Kemudian, Pemerintah Perancis menyatakan bersedia untuk melangkah masuk Policy Matrix yang akhirnya disepakati antara Pemerintah Indonesia, *Agence Française de Développement* (AFD) dan Pemerintah Jepang, pada semester pertama 2008.

### **Peran JICA dalam program Climate Change Program loan (CCPL)**

Untuk melaksanakan program CCPL ini, didirikan komite pelaksanaan sebagai tempat untuk memantau program dan melakukan dialog kebijakan, dan diwakili oleh pemerintah Jepang, Indonesia dan Perancis telah menilai bahwa tindakan kebijakan yang telah direncanakan hingga tahun 2009 dapat mencapai target ataupun melebihi yang diharapkan. Dengan demikian, sangat perlu dan relevan bagi JICA untuk memberikan bantuan melalui program ini untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020

---

<sup>21</sup>Sudo Tomonori and Friends. Promotion of Developing country's climate policy implementation applying Development Policy Loan diakses di: [www.unescap.org/esd/Energy-Security-and-WaterResources/energy/lowcarbon/2009/forum/LCDP-EGM/JICA-sudo.pdf](http://www.unescap.org/esd/Energy-Security-and-WaterResources/energy/lowcarbon/2009/forum/LCDP-EGM/JICA-sudo.pdf) pada: 11 Desember 2013

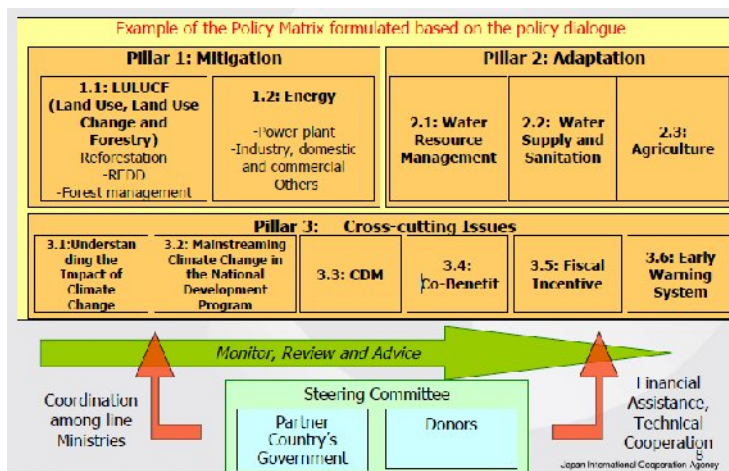
Proyek ini akan melaksanakan tindakan sebagai berikut penanggulangan yang berkaitan dengan perubahan iklim dengan *policy matrix* yang sudah disepakati dengan pemerintah Indonesia.

### Policy matrix Climate Change Program Loan

Kebijakan ini matriks mencakup beberapa poin. Pertama, kebijakan ini matriks dibuat sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Mengatasi Perubahan Iklim dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan diterbitkan pada bulan Desember 2007. Di antara tindakan kebijakan sampai 2050 termasuk dalam rencana untuk masing-masing sektor, 122 tindakan jangka pendek yang dipilih dan disepakati oleh kedua negara untuk Program tiga tahun.

Rencana Aksi Nasional Mengatasi Perubahan Iklim adalah dikembangkan untuk tujuan mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke rencana pembangunan nasional.<sup>22</sup> Hal ini mendorong interaksi tindakan perubahan iklim dengan APBN, memposisikan diri sebagai dasar perumusan untuk selanjutnya Jangka Menengah Rencana Pembangunan Nasional (2010-2014).

### Policy matrix



Sumber: Operations Strategy Department (JICA).2010

Oleh karena itu, tindakan kebijakan kebijakan ini matriks sejajar dengan rencana pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Adalah mungkin untuk mengatakan bahwa Indonesia telah dimaksudkan untuk "mengarusutamakan" isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Kedua, tindakan kebijakan ini matriks diimplementasikan di bawah kepemilikan pemerintah Indonesia. Untuk menerapkan matriks kebijakan, adalah penting untuk

<sup>22</sup> Kementerian Negara lingkungan hidup.2007 Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Diakses di: [crs.itb.ac.id/media/Jurnal/Refs/Critical\\_Review/Archives/REDD%2520Workshop-Flashdisk/4-Reading%2520Material/4-3%2520National%2520Plan%2520of%2520Climate%2520Change.pdf](http://crs.itb.ac.id/media/Jurnal/Refs/Critical_Review/Archives/REDD%2520Workshop-Flashdisk/4-Reading%2520Material/4-3%2520National%2520Plan%2520of%2520Climate%2520Change.pdf) pada: 15 desember 2013

pemerintah Indonesia untuk mengambil memimpin dalam mengkoordinasikan kementerian terkait, lembaga, dan terkait organisasi pelaksana dan untuk terus melaksanakan tindakan sebagai pemilik, menerima dukungan dari donor pada dasar yang dibutuhkan. Ketiga, indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengkonfirmasi pencapaian tindakan pada policy matrix. termasuk sektor kehutanan, sektor energi, industri, domestik (rumah tangga), dan sektor perdagangan, langkah-langkah mitigasi mengadopsi efek kuantitatif melalui kebijakan tindakan sebagai indikator utama. Termasuk sumber daya air, langkah adaptasi mengadopsi efek kualitatif, seperti pengaturan kelembagaan, sebagai indikator utama.

### **Bantuan dana dan bantuan teknis *Climate Change Program Loan (CCPL)*.**

Bantuan Dana yang diberikan JICA kepada Indonesia melalui program *Climate Change program Loan (CCPL)* adalah berupa pinjaman dana yang mana akan diberikan dalam 3 tahap, masing-masing diberikan tiap tahun selama 3 tahun.

- (i) Tahap I: sebesar 30.768 juta yen pada tanggal 2 september 2008,
- (ii) Tahap II sebesar 28.083 juta yen pada tanggal 10 Desember 2009
- (iii) Tahap III sebesar 27.195 juta yen pada tanggal 23 juni 2010.

Pinjaman ini disediakan dalam tahap tunggal disalurkan setiap tahun dan disalurkan melalui dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, dimasukkan ke dalam anggaran umum untuk menutupi defisit fiskal dari Pemerintah Indonesia tersebut.<sup>23</sup> Dana tersebut nantinya untuk dana yang sudah dianggarkan atau masuk ke kas negara, dicairkan langsung ke keuangan pemerintah pelayanan, melalui prosedur pemerintah yang normal, kepada kementerian, departemen, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan anggaran. Tidak ada dana yang dialokasikan untuk setiap spesifik instansi atau kementerian.

Sebagai proyek kerjasama teknis terkait, JICA memberikan dukungan bagi perumusan pedoman tentang pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, JICA juga berencana untuk melaksanakan proyek untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam pengembangan panas bumi (teknik eksplorasi), studi tentang manajemen sisi permintaan listrik dan "Proyek Pengembangan Kapasitas Kembali Lahan Terdegradasi untuk Pelestarian Ekosistem di Kawasan Konservasi "(Maret 2010 - Februari 2015).<sup>24</sup> Dan juga JICA sedang melakukan proyek untuk Mendukung Strategi Pembangunan Rendah Karbon dan Studi *on Demand Side Management* dan rencana untuk melakukan Proyek Peningkatan Kapasitas Peningkatan Geothermal Exploration Technologies pada tahun 2010.

---

<sup>23</sup> Brown, J., Peskett, L. 'Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of Public Finance for Climate Change Mitigation', EDC2020. No: 11 februari 2011 diakses di: [www.edc2020.eu/fileadmin/publications/EDC\\_2020\\_-\\_Working\\_Paper\\_No\\_11\\_-\\_Climate\\_Finance\\_in\\_Indonesia.pdf](http://www.edc2020.eu/fileadmin/publications/EDC_2020_-_Working_Paper_No_11_-_Climate_Finance_in_Indonesia.pdf) pada 21 desember 2012

<sup>24</sup> Todo, Sumonori, 2010 'Climate Change Policy Making and SEA in Indonesia JICA's assistance addressing Climate Change' diakses pada: [www.iaia.org%2Fiaia-climate-symposium-dc%2Fproceedings%2Fiaia%2Fday%25201%2F12\\_IAIA\(JICA\)%2520-%2520Copy.pdf](http://www.iaia.org%2Fiaia-climate-symposium-dc%2Fproceedings%2Fiaia%2Fday%25201%2F12_IAIA(JICA)%2520-%2520Copy.pdf) pada 4 februari 2013

## **Pelaksanaan CCPL**

Pelaksanaan pinjaman program ini membutuhkan keseriusan pemerintah Indonesia. Sebagai langkah pertama, pada bulan Juli 2008 Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah organisasi koordinasi untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan yang telah ditetapkan oleh presiden. organisasi ini akan berfungsi sebagai tubuh utama bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim.

"Komite Pengarah untuk Program Pinjaman Perubahan Iklim" diatur bawahan organisasi, dan Komite Pengarah akan memantau perkembangan kebijakan tindakan dalam matriks kebijakan pinjaman program ini dan akan membahas isu-isu yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan tindakan kebijakan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah Badan Pelaksana, erat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab.

Anggota Komite Pengarah adalah direktur jenderal atau wakil dari kementerian. Pengarah Mandat Komite adalah: memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan kebijakan matriks; keseluruhan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan matriks kebijakan, menyetujui hasil pemantauan; berkoordinasi dengan JICA dan negara pendonor lainnya pada konfirmasi implementasi kebijakan matriks.

Pengembangan yang cukup mitra bantuan pada perubahan iklim secara harmonis. Dengan demikian, tinjauan dan pemantauan kemajuan juga dikoordinasikan dengan mitra yang memperpanjang hibah dan teknis antuan langsung berkaitan dengan pelaksanaan tindakan kebijakan. Telah dilakukan JICA sebagian besar kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan menggunakan tim yang berdedikasi profesional dari Jepang dan Indonesia. JICA juga memberikan Pemerintah Indonesia dengan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan matriks kebijakan dan menyediakan teknis bantuan untuk tindakan kebijakan tertentu. Tim monitoring berkoordinasi dengan JICA ahli ditempatkan di bersangkutan kementerian dan bekerja dengan pembiayaan bersama mitra, dan mitra pembangunan lainnya memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan tindakan kebijakan utama. Tim monitoring setiap tahunnya menghasilkan laporan evaluasi didasarkan pada kemajuan dalam mencapai tindakan kebijakan, sebagaimana didefinisikan dalam matriks. Laporan Evaluasi membentuk dasar untuk keputusan tentang tahap berikutnya pembiayaan dan menginformasikan negosiasi antara mitra pembangunan co-pembiayaan operasi.

Dalam hal pelajaran dari pengalaman, panjangnya matriks kebijakan CCPL membuat sangat memberatkan memantau. JICA telah memiliki tim 15 staf melaksanakan proses pemantauan. Proses Pemantauan yang berat bagaimanapun, memungkinkan keterlibatan mendalam dengan pemerintah di tingkat teknis. Namun demikian, JICA dan AFD telah tertarik untuk memperkecil jalur baris *Policy Matrix* pada tahun 2010 untuk memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan kepemilikan yang lebih baik dari matriks oleh rekan-rekan Pemerintah terlibat. Dalam pertemuan komite teknis pada bulan Februari 2010, semua mitra dan Pemerintah Indonesia sepakat bahwa pendekatan yang efisien akan memungkinkan lebih fokus pada prioritas

kebijakan utama perubahan iklim. Pada tanggal 24 Maret panitia program mencapai kesepakatan tentang pencapaian tindakan sebelum tahun 2009.

### **Perkembangan Pencapaian Penggunaan Dana JICA CCPL**



Sumber: West Japan Engineering Consultants, Inc

pencapaian utama CCPL yang telah berjalan, di antaranya adalah telah dikeluarkannya dua pedoman CCPL, yaitu, pedoman RAN-GRK dan pedoman RAD-GRK, lalu keluarnya regulasi tentang pengelolaan dana eksplorasi panas bumi, dan selesai dirancang Master Plan Transportasi Jabodetabek. Juga, selesainya studi penilaian kerentanan di NTB dan Bali. Di samping pencapaian di atas, dijelaskan juga kemajuan CCPL saat ini yang dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya adalah, saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaan RAD-GRK di seluruh provinsi, dilakukan persiapan studi tentang konsep NAMA yang tercermin dalam pedoman RAN-GRK, dan telah didirikan lembaga pengelolaan bencana local di 33 provinsi. Indikator progres CCPL lainnya adalah, dari total 235 perusahaan per Juli 2012, sebanyak 50 perusahaan di bawah kementerian indonesia dan 185 perusahaan di bawah *Ministry of Energy and Mineral Resources* (MEMR.)<sup>25</sup>

Dan juga dibawah program CCPL, pembangkit listrik tenaga panas bumi akan dibangun di Provinsi Sumatera Selatan dan terhubung ke Sumatera jaringan listrik.<sup>26</sup> Hal ini akan meningkatkan stabilitas pasokan listrik dan kehidupan warga, memberikan kontribusi bagi promosi ekonomi pengembangan dan penggunaan energi terbarukan di kawasan Sumatera. JICA juga menerapkan studi untuk Reformasi kebijakan Indonesia untuk mempromosikan perusahaan swasta untuk bekerjasama dalam mengembangkan panas bumi melimpah energi.

### **Kendala- kendala program CCPL**

Selama berlangsungnya pelaksanaan dari program CCPL dari tahap 1 hingga tahap ke 3, tidak ada kendala yang begitu berarti yang dialami oleh Tim Tenaga Ahli JICA selama mereka melakukan pamantauan terhadap pelaksanaan program. Namun,

---

<sup>25</sup>BAPPENAS. Indonesia Climate Change Program Loan (CCPL) diakses di: <http://www.bappenas.go.id/node/168/3603/indonesia-climate-change-program-loan-ccpl/> pada 11 oktober 2012

<sup>26</sup> Signing of Japanese ODA Loan with the Republic of Indonesia diakses di: <http://www.jica.go.jp/english/news/press/2010/110329.html> pada: 15 februari 2013

risiko bahwa ada isu-isu di luar kendali masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah mungkin timbul dalam perbaikan kebijakan dan sistem yang ditargetkan.

## **Simpulan**

Dalam penanggulangan perubahan iklim pemerintah Indonesia dan JICA merumuskan suatu program dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan aspek sistematis penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Program tersebut adalah program *Climate Change Program Loan* (CCPL). CCPL ini dirancang untuk mendukung aksi-aksi kebijakan yang disepakati berdasarkan kunci pilar kebijakan mitigasi, adaptasi, dan isu-isu lintas memotong dalam hal pengurangan gas rumah kaca mendorong dan penyerapan, memperkuat ketahanan negara terhadap dampak negatif diantisipasi karena iklim mengubah dan meningkatkan kerangka kerja institusional yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dilihat dari program yang telah disepakati. Bantuan dana yang diberikan oleh JICA melalui program CCPL telah dimaksimalkan pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan berdasarkan pada kesepakatan untuk mencapai hasil yang telah disepakati. Indikator keberhasilan program CCPL dalam menatasi perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2007. Dimana sampai dengan tahun 2009, telah banyak kemajuan yang dicapai oleh setiap kegiatan dalam upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

## **Referensi**

### **Buku:**

Arase, David. 1995. *Buying power : the political economy of Japan's foreign aid*. Lynne Rienner Publishers.

Bruce M. Koppel and Robert M. Orr, Jr., eds., *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New Era*. Boulder, CO: Westview Press, 1993.

### **Jurnal:**

Brown, J., Peskett, L. '*Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of Public Finance for Climate Change Mitigation*', EDC2020. No: 11 februari 2011 diakses di: [www.edc2020.eu/fileadmin/publications/EDC\\_2020\\_-\\_Working\\_Paper\\_No\\_11\\_-\\_Climate\\_Finance\\_in\\_Indonesia.pdf](http://www.edc2020.eu/fileadmin/publications/EDC_2020_-_Working_Paper_No_11_-_Climate_Finance_in_Indonesia.pdf) pada 21 desember 2012

Dennis D. Trinidad, "Japan's ODA at The Crossroads: Disbursement Patterns of Japan's Development Assistance To Southeast Asia", dalam *Jurnal Asia Perspective*, Vol. 31, No. 2, 2007, dari [www.asianperspective.org/articles/v31n2-e.pdf](http://www.asianperspective.org/articles/v31n2-e.pdf), pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 14.20 WIB.

Kementerian Negara lingkungan hidup.2007 Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Diakses di: [crs.itb.ac.id/media/Jurnal/Refs/Critical\\_Review/](http://crs.itb.ac.id/media/Jurnal/Refs/Critical_Review/)

Archives/REDD%2520Workshop-Flashdisk/.pdf pada: 15 desember 2013

Ohno, Izumi. 2003. Japan's ODA at a Crossroads: Striving for A New Vision. Japan Economic Current, No. 31, April, 4-7. Ohno, Izumi. 2003. Japan's ODA at a Crossroads: Striving for A New Vision. Japan Economic Current, No. 31, April, 4-7.

### **Undang-undang:**

Peraturan presiden No. 46/2008 [www.esdm.go.id/batubara/doc\\_download/845-peraturan-presiden-ri-no46-tahun-2008-.html](http://www.esdm.go.id/batubara/doc_download/845-peraturan-presiden-ri-no46-tahun-2008-.html) diakses pada: 25 januari 2013

### **Dokumen:**

Boer, R. Wahab, I. and Hariadi, M.H. 2004. *Understanding Farmers' Need To Climate Information*. In R. Boer, I. Wahab., M.H. Hariadi and H. Hardjanto. Reducing Climate Risk for Potato and Chili Production at Pengalengan, Bandung District, West Java.

Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk Keadilan Iklim, 2012 (Disampaikan pada diskusi public Pendanaan Perubahan Iklim dan Penyelamatan Hutan pada Kamis, 4 Oktober 2012 di Jakarta).

Government of Japan. 2004. *Country Assistance Program for Indonesia*. Diakses di: [www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e\\_asia/indonesia.pdf](http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/indonesia.pdf) pada: 21 desember 2013

*Study on Local Action In Asia Contributing to Climate Change and Mitigation and Alternative Financial Mechanism in Indonesia* diakses di: [dp2m.umm.ac.id/files/file/financinglocalallowcarbondevelopment\\_indonesia.pdf](http://dp2m.umm.ac.id/files/file/financinglocalallowcarbondevelopment_indonesia.pdf) pada 2 maret 2013

### **Website:**

Jepang Anggap Stabilitas Ekonomi Indonesia Penting Bagi Asia. Dikutip: <http://www.setkab.go.id/berita-6385-jepang-anggap-stabilitas-ekonomi-indonesia-penting-bagi-asia.html>

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia, 2009. 'Emisi Gas Rumah kaca Dalam Angka'. Diakses di [www.new.menlh.go.id/%2FPublikasi%2FBuku%2FLain-lain%2FEmisi\\_GRK.pdf](http://www.new.menlh.go.id/%2FPublikasi%2FBuku%2FLain-lain%2FEmisi_GRK.pdf) pada 21 februari 2013

MOFA, *Japan's Official Development Assistance, Accomplishment and Progress of 50 Years*, Tokyo, 2005, <http://www.mofa.go.jp/POLICY/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/> diakses pada 10 februari 2013 pukul: 13.20

BAPPENAS. Indonesia Climate Change Program Loan (CCPL) diakses di: <http://www.bappenas.go.id/node/168/3603/indonesia-climate-change-program-loan-ccpl/> pada 11 oktober 2012